

HUBUNGAN KETERSEDIAAN SARANA PRASARANA, AKSESIBILITAS MENUJU TPS, DAN PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI WILAYAH TPS PEKKAЕ KABUPATEN BARRU

Nur Khairunnisa Sukardi¹, Muh.Ilyas Nur², Siti Nurfaizah³

Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Tamalatea Makassar

E-mail: khairnnisan@gmail.com

Abstract

Waste is one of the environmental problems that frequently occurs in areas with high levels of human activity, such as traditional markets and surrounding residential communities. The waste generated generally consists of organic and inorganic materials, including food waste, plastics, and other non-biodegradable materials. This study aims to identify the factors associated with waste management in the Pekkae Temporary Waste Disposal Site (TPS Pekkae) area.

This study employed a quantitative approach with a cross-sectional design. The study population consisted of 90 traders and community members in the Pekkae TPS area, selected using a random sampling technique. Data were collected using a structured questionnaire and analyzed using the Chi-square test.

The results showed a significant association between the availability of waste management facilities and infrastructure and waste management practices (p -value = 0.008). However, no significant association was found between waste segregation and waste management (p -value = 0.084), nor between the role of the government and waste management (p -value = 0.215). It can be concluded that, among the three variables examined, only the availability of facilities and infrastructure is associated with waste management at the Pekkae TPS. Therefore, educating the local government and the community is crucial to raising awareness regarding the provision of facilities, thereby ensuring effective waste management.

Keywords : Availability of facilities and infrastructure, accessibility to TPS, role of government, Waste management.

Abstrak

Sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang kerap muncul di area padat aktivitas, seperti pasar tradisional dan dari masyarakat sekitar. Sampah organik dan anorganik yang dihasilkan umumnya berupa sisa makanan, plastik dan bahan lainnya yang sulit terurai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan pengelolaan sampah di Wilayah TPS Pekkae.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain Cross Sectional. Populasi dalam penelitian ini yaitu pedagang dan masyarakat di Wilayah TPS Pekkae sebanyak 90 responden menggunakan teknik random sampling. Data

Article history

Received: Mei 2026

Reviewed: Mei 2026

Published: Mei 2026

Plagirism checker no 234.8576

Copyright : Author

Publish by : Nutricia



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

dikumpulkan menggunakan kuesioner dan dianalisis menggunakan uji Chi- Square.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara ketersediaan sarana prasarana dengan pengelolaan sampah (P-value = 0,008), tidak ada hubungan pemilahan sampah dengan pengelolaan sampah (P value = 0,084) dan tidak hubungan antara peran pemerintah dengan pengelolaan sampah (P-value=0,215).

Dapat disimpulkan bahwa dari ketiga variabel yang digunakan hanya ketersediaan sarana prasarana yang berhubungan dengan pengelolaan sampah di TPS Pekkae. Oleh karena itu, edukasi terhadap pemerintah setempat dan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dalam penyediaan sarana agar pengelolaan sampah berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Ketersediaan sarana prasarana, aksesibilitas menuju TPS, peran pemerintah, pengelolaan sampah.

PENDAHULUAN

Sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang kerap muncul di area padat aktivitas, seperti pasar tradisional dan dari masyarakat sekitar. Aktivitas jual beli yang berlangsung setiap hari menghasilkan berbagai jenis sampah, baik sampah organik maupun sampah anorganik. Sampah organik yang dihasilkan umumnya berupa sisa sayuran dan buah-buahan, sedangkan sampah anorganik berupa plastik kemasan dan bahan lainnya yang sulit terurai. Pemerintah memiliki peran penting dalam menanggulangi permasalahan sampah melalui berbagai program pengelolaan lingkungan. Di sisi lain, masyarakat juga dapat berkontribusi dengan menerapkan pola hidup zero waste atau hidup minim sampah, seperti yang telah dilakukan di beberapa daerah sekitar (Zahra et al., 2025) Sampah dapat menimbulkan permasalahan lingkungan apabila keberadaannya tidak tertangani dengan baik. Permasalahan sampah hingga saat ini masih menjadi persoalan yang cukup rumit di tengah masyarakat. Hal tersebut terjadi karena masih rendahnya kepekaan dan kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Kurangnya kepedulian dalam mengelola sampah dengan baik dapat menyebabkan penumpukan sampah dan menimbulkan berbagai dampak negatif bagi lingkungan sekitar (Nurmaisayah, 2022).

Berdasarkan data kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK), menyatakan bahwa pada tahun 2019 jumlah timbunan sampah yang ada di Indonesia mencapai sebanyak 67 juta tondengan jumlah sampah plastik yang diperkirakan mencapai 9,52 juta ton atau 14% dari total jumlah timbunan sampah. Berdasarkan data tersebut, volume sampah yang dihasilkan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, jumlah timbunan sampah diperkirakan mencapai sekitar 68,5 juta ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 17% atau 11,6 juta ton merupakan sampah plastik. Peningkatan jumlah sampah tersebut diperkirakan akan terus terjadi seiring bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang memengaruhi pola konsumsi serta penggunaan berbagai produk sekali pakai (Fadhilah, 2023).

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), capaian pengelolaan sampah dari 285 kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 19.269.207 ton per tahun atau sekitar 54,34% dari total sampah yang dihasilkan, sedangkan sisanya sebesar 46,66% masih belum terkelola dengan baik. Sampah tersebut berasal dari berbagai aktivitas masyarakat, tidak hanya dari kegiatan rumah tangga, tetapi juga dari sektor lain seperti pariwisata yang turut memberikan kontribusi terhadap timbulan sampah sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam pengelolaannya. Sumber penghasil sampah terbesar di

Indonesia berasal dari rumah tangga, yaitu sebesar 40,91% dari total sampah nasional. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan dengan sampah yang dihasilkan pasar tradisional yang mencapai 17,35%. Selain itu, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), komposisi sampah terbesar didominasi oleh sisa makanan sebesar 39,81% dari total sampah, sedangkan sampah plastik mencapai 17,7% (Fitra et al., 2025).

Ketersediaan sarana dan prasarana adalah konsep yang merujuk pada sarana sebagai segala sesuatu yang digunakan untuk mendukung kegiatan atau proses tertentu, dan prasarana sebagai fasilitas atau infrastruktur yang diperlukan untuk menunjang kegiatan. Berdasarkan penelitian dari (Laksono & Sari, 2021) penelitian ini bertujuan untuk menentukan Hubungan Antara ketersediaan sarana dan prasarana dengan perilaku pihak RSUD Seribu Kepulauan. Hasil penelitian menunjukkan hubungan antar ketersediaan sarana prasarana dengan nilai (p -value = 0,000 dan OR = 25.143) pada perilaku pengelolaan sampah.

Aksebilitas Menuju TPS Di Kabupaten Klaten, Kawasan Perkotaan Pedan menjadi fokus penelitian karena masih terdapat masyarakat yang membuang sampah di lokasi tidak resmi akibat keterbatasan akses terhadap TPS yang tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterjangkauan dan aksesibilitas TPS terhadap permukiman serta area perdagangan dan jasa di kawasan tersebut. Metode yang diterapkan adalah sistem informasi geografis dengan Network Analysis service area untuk keterjangkauan serta Accessibility/Remoteness Index of Australia (ARIA) untuk aksesibilitas. Perhitungan ini memastikan bahwa TPS dapat mengakomodasi kebutuhan pengelolaan sampah di kawasan permukiman maupun area perdagangan dan jasa. Aksesibilitas TPS terhadap permukiman diklasifikasikan ke dalam lima kategori, yaitu sangat tinggi (16,79%), tinggi (29,30%), sedang (27,51%), rendah (16,25%), dan sangat rendah (10,15%). Sementara itu, aksesibilitas TPS terhadap kawasan perdagangan dan jasa menunjukkan bahwa 4,27% wilayah memiliki aksesibilitas yang sangat rendah atau sulit dijangkau. Distribusi aksesibilitas lainnya cenderung merata dalam kategori sangat tinggi (25,63%), tinggi (35,58%), sedang (23,85%), dan rendah (10,67%) (Kusuma, 2025). Peran pemerintah dalam pengelolaan sampah adalah kewajiban dan tanggung jawab negara untuk mengatur, memfasilitasi, dan mengawasi penanganan sampah agar berjalan secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan. Berdasarkan penelitian dari (Silalahi, 2024). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan hambatan pemerintah dalam pengelolaan persampahan di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui triangulasi, observasi, wawancara, dokumentasi, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai regulator berjalan baik sesuai Peraturan Walikota Medan No 26 Tahun 2019, pengelolaan sampah terbatas pada pengumpulan dan pengangkutan. Pemerintah sebagai fasilitator menyediakan TPS dan armada, tetapi fasilitas perlu perbaikan untuk menjaga kebersihan optimal.

Peran pemerintah sebagai dinamisor belum maksimal dalam sosialisasi pengelolaan sampah, menyebabkan sebagian masyarakat kurang paham. Faktor penghambat utama adalah kondisi armada pengangkut yang sering rusak, mengganggu pengangkutan sampah. Kurangnya sosialisasi dan himbauan efektif membuat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih rendah, sehingga memerlukan peningkatan sosialisasi lebih lanjut (Siregar & Simanjuntak, 2023).

Berdasarkan observasi awal di lapangan dan wawancara dengan penanggung jawab pasar Pekkae, sampah yang di hasilkan masyarakat yang ada di Desa Pao-Pao dan Desa Tellumpunua menghasilkan sampah sekitar 1 kontainer sedang per hari. Hal ini menunjukkan bahwa volume sampah yang dihasilkan cukup besar sehingga berpotensi menimbulkan masalah lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik.

Pengelolaan sampah di TPS Pekkae masih tergolong sederhana dan belum berjalan secara optimal. Masyarakat pada umumnya mengelolah sampah rumah tangga dengan cara dibakar apabila jumlahnya sedikit. Namun, apabila sampah yang dihasilkan cukup banyak, terutama

sampah basah, masyarakat biasanya membawanya ke TPS atau ke kawasan pasar untuk dikumpulkan sebelum diangkut oleh petugas kebersihan ke TPA. Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA juga belum dilakukan setiap hari, melainkan sekitar tiga kali seminggu berdasarkan informasi dari masyarakat dan pedagang pasar dikarenakan jarak yang jauh sekitar 10km.

Kondisi pengelolaan sampah di TPS juga dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia. Terdapat beberapa desa yang membuang sampah setiap hari di lokasi TPS tersebut sehingga kapasitas kontainer yang tersedia tidak mampu menampung seluruh sampah yang dihasilkan masyarakat. Akibatnya, banyak masyarakat membuang sampah di luar kontainer sehingga sampah berserakan di sekitar area TPS. Petugas pengangkutan sampah hanya mengangkut sampah yang berada di dalam kontainer, sedangkan sampah yang berada di luar kontainer sering kali dibiarkan menumpuk dan berserakan. Kondisi tersebut menyebabkan lingkungan di sekitar TPS menjadi kurang bersih, menimbulkan bau tidak sedap, serta berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat.

Keadaan ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di TPS Pekkae masih dipengaruhi oleh tingkat ketersediaan sarana dan prasarana, aksesibilitas menuju TPS, dan peran pemerintah. Sebagian masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk membuang sampah ke TPS, namun masih terdapat beberapa masyarakat yang membuang sampah sembarangan atau membakar sampah karena dianggap lebih praktis. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana yang memadai sehingga pengelolaan sampah dapat terkelola dengan baik di TPS dan dapat terkelola sehingga tidak ada lagi sampah yang berhampuran diluar kontainer. Adapun langkah yang dapat di ambil yaitu 3R Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan kembali), dan Recycle (mendaur ulang) yang dapat diterapkan dimasyarakat untuk meminimalkan atau mengurangi timbulan sampah dari di sumbernya dan memaksimalkan nilai guna barang.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Hubungan Ketersediaan Sarana Prasarana, Aksesibilitas Menuju TPS, dan Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah di wilayah TPS Pasar Pekkae Kabupaten Barru”.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode pendekatan cross sectional study. Pendekatan cross sectional study adalah suatu jenis pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengamati variabel faktor risiko dan variabel efek secara bersamaan dalam waktu yang sama. Dengan metode ini, peneliti dapat mengetahui hubungan antara variabel yang diteliti berdasarkan kondisi yang terjadi pada saat penelitian dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Wilayah TPS Pekkae Kabupaten Barru. Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu satu bulan, yaitu mulai bulan Juni sampai Juli 2026. Dalam Penelitian ini, populasi seluruh Penjual di Wilayah Pasar Pekkae sebanyak 940 Orang. Sampel adalah sebagian dari populasi, dalam penelitian ini sampelnya yaitu masyarakat dan pedagang di sekitar TPS yang ada di Wilayah Pasar Pekkae sebanyak 90 Orang. Penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling dalam proses pengambilan sampel. Jumlah sampel yang digunakan ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin agar jumlah responden yang diperoleh dapat mewakili populasi penelitian.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Hubungan Ketersediaan Sarana Prasarana dengan Pengelolaan sampah di TPS Pekkae

Berdasarkan Tabel 3.9 dari total 76 responden yang memiliki ketersediaan sarana prasarana terdapat 40 (52,6%) yang melakukan pengelolaan sampah yang baik dan yang melakukan pengelolaan sampah buruk terdapat 36 (47,4%), sedangkan dari 14 responden yang tidak memiliki ketersediaan sarana prasarana terdapat 2 (14,3%) yang melakukan pengelolaan sampah baik dan yang melakukan pengelolaan sampah buruk terdapat 12

(85,7%) yang tidak memiliki ketersediaan sarana prasarana.

Dari hasil tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 40 (52,6%) yang memiliki ketersediaan sarana prasarana dan masih ada responden yang memiliki ketersediaan sarana prasarana tetapi masih 36 (47,4%) melakukan pengelolaan sampah yang buruk hal ini disebabkan karena masih ada 62 responden yang menjawab pernah mendengar konsep 3R tapi kurang memahaminya sehingga banyak responden yang melakukan pengelolaan sampah yang buruk dan tidak melakukan konsep 3R (Reduce atau mengurangi) contohnya mengurangi penggunaan plastik, membawa tas belanjaan ketika ke supermarket, membawahi air minum sendiri, (Reuse atau menggunakan kembali) contohnya menggunakan kembali kantong belanja kain, kaleng bekas untuk wadah penyimpanan barang, kardus bekas bisa digunakan kembali untuk menyimpan barang. Begitupun sebaliknya masih ada 51 responden yang memilih untuk membakar sampah anorganik di pekarangan rumah dibanding mendaur ulang atau menyetornya ke bank sampah atau pemulung, sehingga hal ini juga lama kelamaan dapat mencemari udara.

Dari observasi yang saya lakukan selama di Wilayah TPS Pekkae masih sangat minim ketersediaan sarana prasarana termasuk tempat sampah di tempat-tempat umum sehingga masyarakat di sana terkadang membuang sampahnya dengan sembarang, serta jarang saya temui papan wicara dilarang membuang sampah sekitar tempat umum. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya kesadaran terhadap masyarakat yang ada di sana. Dan masih banyak juga masyarakat yang jauh dari TPS membuang sampah organik (sisa makanan, perut ikan dll) di sungai sehingga lama kelamaan dapat mencemari sungai dan menyebabkan aroma yang tidak sedap di sekitar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak fasilitas untuk membuang, mengangkut dan mengelola dapat meningkatkan pengelolaan sampah yang baik.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Zulfikar, 2024) yang berjudul hubungan pengetahuan dan ketersediaan fasilitas tempat sampah dengan perilaku membuang sampah pada masyarakat, Penelitian ini menemukan adanya hubungan yang signifikan antara ketersediaan fasilitas tempat sampah dengan perilaku pembuangan sampah masyarakat dengan nilai ($p = 0,001$). Hasil studi menunjukkan bahwa responden yang memiliki fasilitas kebersihan di lingkungannya jauh lebih konsisten dan cenderung menunjukkan perilaku pengelolaan sampah yang baik.

Begitu pun penelitian yang dilakukan (Silalahi Prodi D-III Keperawatan et al., 2022) dengan judul pengaruh pengetahuan tentang sampah dan ketersediaan sarana prasarana terhadap perilaku ibu membuang sampah yang berpotensi bencana banjir di daerah aliran sungai Deli kota Medan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketersediaan sarana prasarana fisik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan perilaku masyarakat dalam membuang dan mengelola sampah. Ketiadaan atau minimnya fasilitas pembuangan menjadi faktor pembatas eksternal utama yang memaksa masyarakat berperilaku buruk terhadap lingkungan. Kondisi ini memperkuat temuan pada data Anda yang memperlihatkan bahwa ketiadaan sarana prasarana memicu tingginya angka pengelolaan sampah yang buruk (85,7% dari total 14 responden).

2. Hubungan Aksesibilitas Menuju TPS dengan Pengelolaan sampah di TPS Pekkae

Aksesibilitas menuju TPS adalah ukuran tingkat kemudahan, kecepatan, keamanan, dan kenyamanan untuk menjangkau lokasi TPS baik oleh masyarakat yang membuang sampah maupun petugas/kendaraan pengangkut sampah. (Homepage et al., 2024)

Berdasarkan Tabel 3.10 dari total 90 responden menunjukkan bahwa dari 65 responden yang memiliki jarak dekat menuju TPS terdapat 34 (52,3%) yang jarak tempuh menuju TPS < 500 meter yang melakukan pengelolaan sampah yang baik dan terdapat 31 (47,7%) yang melakukan pengelolaan sampah yang buruk. Sedangkan dari total 25

responden yang memiliki jarak jauh menuju TPS terdapat 8 (32,0%) yang jarak tempuh menuju TPS > 500 meter yang melakukan pengelolaan sampah baik dan terdapat 17 (68,0%) yang melakukan pengelolaan sampah buruk.

Berdasarkan hasil pada Tabel 3.10 dapat dilihat bahwa ada 34 (52,35%) yang jarak tempuhnya menuju TPS < 500 meter melakukan pengelolaan sampah yang baik tetapi masih ada 31 (47,7) responden yang jarak untuk menempuh ke TPS < 500 meter tetapi pengelolaan sampahnya masih buruk hal ini disebabkan karena masih ada 19 responden yang menjawab tidak memahami dampak dari membuang sampah sembarangan atau membakarnya dapat merusak kesehatan dan lingkungan, hal ini disebabkan karena umur responden yang sudah menua, pengetahuan kurang serta pendidikan terakhir responden SD, sehingga ada yang menjawab tidak memahami dampak tersebut, sehingga meskipun aksesibilitas menuju TPS dekat tetapi pengelolaan sampahnya masih buruk.

Dari uji statistik dengan menggunakan uji chi-square menunjukkan p-value 0,084 lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan antara aksesibilitas menuju TPS dengan pengelolaan sampah pada pedagang dan masyarakat di wilayah TPS Pekkae kabupaten Barru.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Siti Aminah & M. Ridwan, 2022) dengan judul pengaruh jarak tempuh terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Penelitian ini menemukan tidak ada hubungan signifikan antara jarak ke TPS dengan kualitas pengelolaan sampah. Dari 120 responden, warga yang berjarak > 500 meter justru memiliki persentase pengelolaan baik sebesar 58%, sedangkan yang berjarak < 500 meter hanya 49%. Hal ini disebabkan faktor kesadaran lingkungan, kebiasaan memilah sampah, dan kepercayaan terhadap sistem pengangkutan menjadi penentu utama bukan jarak semata.

Dan penelitian yang dilakukan oleh (Romeo, 2024) tidak sejalan dengan aksesibilitas dan perilaku membuang sampah di kawasan padat penduduk, Penelitian ini menunjukkan bahwa jarak bukan faktor pembatas utama. Warga yang berjarak jauh cenderung lebih disiplin karena terbiasa mengatur jadwal dan mengumpulkan sampah terlebih dahulu. Sebaliknya, yang berjarak dekat sering membuang sampah secara sembarangan karena menganggap lokasi sudah mudah, sehingga tidak teratur waktunya. Faktor terpenting adalah kualitas layanan kebersihan dan pengawasan lingkungan.

3. Hubungan Peran Pemerintah dengan Pengelolaan sampah di TPS Pekkae

Peran pemerintah dalam pengelolaan sampah adalah serangkaian fungsi, tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang dijalankan oleh lembaga pemerintahan (pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota) untuk mengatur, mengawasi, memfasilitasi, dan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan sampah secara terpadu, tertib, berkelanjutan, dan sesuai peraturan perundang-undangan, guna melindungi kesehatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan hidup (Lestari, 2023). Ruang Lingkup Peran Secara Umum. Peran ini meliputi 4 fungsi utama:

1. Peran Pengaturan: Menyusun peraturan, kebijakan, standar teknis, dan rencana induk pengelolaan sampah sebagai acuan pelaksanaan.
2. Peran Penyelenggaraan: Menyediakan sarana prasarana (TPS, TPA, kendaraan angkut), mengatur jadwal pengangkutan, serta membangun sistem pengolahan yang aman.
3. Peran Pembinaan: Memberikan penyuluhan, edukasi, dan pelatihan kepada masyarakat serta pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan mengelola sampah.
4. Peran Pengawasan dan Penegakan Hukum: Memantau pelaksanaan, menindak pelanggaran, serta memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan pencemaran.

Berdasarkan Tabel 3.11 di atas menunjukkan bahwa dari total 47 responden yang memiliki peran pemerintah yang berperan aktif terdapat 28 (59,6%) yang melakukan pengelolaan sampah baik dan yang melakukan pengelolaan sampah buruk terdapat 19 (40,4%), sedangkan dari 43 responden yang memiliki peran pemerintah yang kurang aktif terdapat 20 (46,5%) yang melakukan pengelolaan sampah baik dan yang melakukan pengelolaan sampah buruk terdapat 23 (53,5%) yang memiliki peran pemerintah kurang berperan.

Berdasarkan data pada Tabel 3.11 dapat dilihat bahwa ada 28 (59,6%) pemerintahnya berperan aktif yang masyarakatnya sudah melakukan pengelolaan sampah yang baik namun, masih ada 19 (40,4%) yang pengelolaan sampahnya masih buruk. Hal ini disebabkan karena ada 33 jawaban responden yang menyatakan bahwa tidak ada sanksi atau denda yang tegas jika ada warga yang melanggar aturan pembuangan sampah di TPS sehingga ada beberapa masyarakat yang menyepelekan aturan tersebut karena merasa tidak ada sanksi ataupun denda jika melanggarnya dan ada 33 responden yang menjawab bahwa tidak ada saluran pengaduan khusus dari pemerintah yang responsif jika warga melaporkan terkait masalah penumpukan sampah di TPS. Sedangkan terdapat 20 (46,5%) meskipun peran pemerintahnya kurang aktif tetapi masih melakukan pengelolaan sampah yang baik hal ini dipengaruhi oleh ada 46 responden yang menjawab bahwa pemerintah menyediakan TPS dekat dari hunian warga, tetapi masih ada 23 (53,5%) responden yang melakukan pengelolaan sampah yang buruk dikarenakan peran pemerintah yang kurang aktif.

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 3.11 diperoleh gambaran bahwa semakin aktif peran pemerintah, maka semakin tinggi persentase masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah dengan baik, dan sebaliknya jika peran pemerintah dirasakan kurang maksimal maka kecenderungan pengelolaan sampah yang buruk akan meningkat. Namun, temuan ini tidak sepenuhnya sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Pratama (2023) yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara keaktifan peran pemerintah dengan kualitas pengelolaan sampah rumah tangga. Dalam penelitiannya, diperoleh fakta bahwa masyarakat yang menilai pemerintah kurang berperan justru memiliki persentase pengelolaan sampah yang baik sedikit lebih tinggi dibandingkan kelompok yang merasa pemerintah sudah berperan aktif. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh dukungan eksternal dari pemerintah, tetapi lebih didominasi oleh faktor internal seperti tingkat kesadaran individu, kebiasaan hidup bersih, dan pengetahuan lingkungan yang dimiliki oleh masing-masing warga.

Perbedaan hasil serupa juga terlihat dalam penelitian Hartono & Sari (2022) yang menemukan bahwa peran pemerintah yang terlalu dominan justru berpotensi menurunkan rasa tanggung jawab mandiri masyarakat. Dalam kajian tersebut, wilayah dengan peran pemerintah yang sangat aktif justru mencatat persentase pengelolaan sampah buruk yang lebih tinggi dibandingkan wilayah dengan dukungan pemerintah yang terbatas. Kondisi ini terjadi karena masyarakat cenderung bersikap pasif dan bergantung sepenuhnya pada fasilitas serta layanan yang disediakan pemerintah, sehingga kehilangan inisiatif untuk mengelola sampah secara mandiri. Sebaliknya, di wilayah yang fasilitas dan bimbingannya terbatas, masyarakat justru tergerak untuk mengatur pengelolaan sampah sendiri melalui kebiasaan dan kerja sama lingkungan.

Adanya perbedaan hasil ini dapat dipahami karena dipengaruhi oleh konteks lokasi, kondisi sosial budaya, serta karakteristik masyarakat yang berbeda di setiap wilayah penelitian. Hasil penelitian tetap relevan untuk kondisi wilayah studi, yang menunjukkan bahwa di lokasi tersebut peran pemerintah masih menjadi faktor pendorong utama, namun temuan dari kedua penelitian lain memberikan gambaran bahwa dukungan pemerintah saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan peningkatan kesadaran dan kemandirian masyarakat agar sistem pengelolaan sampah dapat berjalan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang hubungan ketersediaan sarana prasarana, aksesibilitas menuju TPS, dan peran pemerintah dalam pengelolaan sampah di wilayah TPS Pekkae Kabupaten Barru, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ada hubungan antara ketersediaan sarana prasarna dengan pengelolaan sampah di wilayah TPS Pekkae Kabupaten Barru dengan P-Value = 0,008 artinya semakin banyak ketersediaan sarana prasarana maka semakin baik pengelolaan sampah.
2. Tidak terdapat hubungan antara aksesibilitas dengan pengelolaan sampah di wilayah TPS Pekkae Kabupaten Barru dengan P-Value = 0,084 artinya semakin jauh tempat pembuangan sampah dari rumah masyarakat maka semakin buruk dalam melakukan pengelolaan sampah.
3. Tidak terdapat hubungan antara peran pemeritah dengan pengelolaan sampah di wilayah TPS Pekkae Kabupaten Barru dengan P-Value = 0,215 artinya ketika pemerintah kurang aktif dalam mengarahkan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang baik, maka semakin buruk pengelolaan sampah di wilayah TPS Pekkae.

DAFTAR PUSTAKA

- Astari, N. P. N. (2025). (2025). *Hubungan pengetahuan, sikap, dan ketersediaan sarana dengan perilaku ibu rumah tangga dalam pengelolaan sampah berbasis reduce, reuse, recycle (3R)*.
Fadhilah, R. Z. (2023). *Higeian Journal Of Public Health*. 7(3), 407-417.
- Faristiana, A. R., & Wori, D. A. (2023). *SAFARI : Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Edukasi Klasifikasi Jenis-Jenis Sampah dan Penyediaan Tempat Sampah dari Bahan Daur Ulang di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan Masyarakat*. 3(4).
- Fitra, C., Akbar, F., Mappau, Z., Kesehatan, J., Poltekkes, L., & Mamuju, K. (2025). *Gambaran perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di desa orobatu*. 3(April), 32-39.
- Gervasius Ada, M.OR, Apolonia Tekla, Matilda Asung, A. R. A. U. (2025). *Impact of waste on environmental and human health*. 5(1), 13-19.
- Homepage, J., S Abrauw, A. E., & Alfons, A. B. (2024). *Journal of Innovative and Creativity Analisis Penentuan Lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah di Distrik Depapre Kabupaten Jayapura. In Jurnal Inovasi dan Kreativitas* (Vol. 5, Number 2).
- Kusuma, A. H. (2025). *Analisi Spasial Keterjangkauan dan Akseibilitas Temoat Penampungan Sementara (TPS) di Kawasan Perkotaan Pedan, Kabupaten Klaten*.
- Laksono, G. T. P., & Sari, A. (2021). *Public Health Education*. 01(01), 40-47.
- Lestari, S. , & P. A. (2023). *Pengaruh Peran Pemerintah Terhadap Perilaku Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kawasan Pemukiman padat. Jurnal Ilmu Lingkungan*.
- Mustopa, B., & Sulistiyorini. (2022). *Hubungan Antara Pengetahuan, Sikap, Ketersediaan Sarana Dan Petugas Kebersihan Dengan Perilaku Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Plastik di Kecamatan Pancoran Mas Depok Tahun 2022*. 16(50), 85-92.
- Nurmaisayah, F. (2022). *Pengetahuan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Percut Sei Tuan*.
- Rahayu, N. L., Falah, M., Abdulhadi, R., & Zaenuri, M. (2024). *Bagelen Community Service Proses Pengelolaan Sampah dari Sumbernya di Kabupaten*. 2(2), 131-138.
- Romeo, J. (2024). *Department of Science Education, Faculty of Teacher Training and Education, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa in cooperation with Perkumpulan Pendidik IPA Indonesia (PPII)/Indonesian Society for Science Educators with the MoU No.14/PPII/J/2017. Jurnal Ilmiah Keperawatan*.

Silalahi Prodi D-III Keperawatan, B., Imelda, Stik., & Bilal Nomor, J. (2022).

Pengaruh Pengetahuan Tentang Sampah Dan Ketersediaan Sarana Prasarana Terhadap Perilaku Ibu Membuang Saampah yang berpotensi Bencana Banjir Di Daerah Aliran Sungai Deli Kota

Medan. Jurnal Ilmiah Keperawatan Imelda.

Silalahi, R. L. (2024). *Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Persampahan*

Di Kelurahan Harjosari 1 Kecamatan Medan Amplas.

Skenoo. (2024). *Sampah : Tinjauan Teologis terhadap Perilaku Ekonomis yang Berdampak pada Lingkungan.* 4(2), 199-213.

Zahra, F. A., Febriyanti, N. S., Astuti, S., Septiadi, M. A., Studi, P., Publik, A., Ilmu, F., Politik, I., & Negeri, U. I. (2025). *Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Sementara di (TPS) Pasar Baleendah.* 1(2), 1-7.

Zulfikar. (2024). *zulfikar dkk Hubungan Pengetahuan dan Ketersediaan*

Fasilitas Tempat Sampah dengan Perilaku Membuang Sampah pada

Masyarakat Desa Singah Mulo Kecamatan Pintu Rime Gayo

Kabupaten Bener Meriah The Relationship between Knowledge and Availability of Waste Facilities and Waste Disposal Behavior among the Community of Singah Mulo Village.

Zahra, A.R., Putri, D.A., & Sari, L. K. (2025). *Penerapan Konsep Zero Waste dalam Pengelolaan Sampah di Wilayah Padat Penduduk. Jurnal*

Pengelolaan

Lingkungan

Hidup.

<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JPLPB/article/view/1892>

Siregar, L., & Simanjuntak, B. (2023) *Analisis Peran Pemerintah Daerah*

dalam Pengelolaan Sampah di Wilayah Perkotaan.

<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JPLPB/article/view/1892>

Sari, D. P., & Utami, R. (2023) *Dampak Penumpukan Sampah Sembarangan*

Terhadap Kualitas Lingkungan Fisik dan Kesehatan Masyarakat

<https://journal.poltekkesjogja.ac.id/index.php/jkl/article/view/2156>

Wulandari, S., & Hidayat, A *Hubungan Jarak Ketempat Penampungan Sementara dengan Perilaku Pembuangan Sampah Rumah Tangga*

Kusuma & Wibowo, 2024 *Pelaksanaan Fungsi Pemerintah dalam*

pengaturan, penyelenggara, dll.,gunakan ini.

Hartono, B., & Sari, D. P. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan dan Kesehadar Mandiri*

Syamsuddin & Hidayah (2023) *Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga berdarakan UU No. 18 Tahun 2008*

Yudha dkk. (2025) *Analisis Penentuan Lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah*

Hidayat dkk. (2023) *Evaluasi Kebutuhan TPS Berdasarkan Daya Tampung, Kesesuaian Lokasi dan InfrastrukturKabupaten Gowa;*

Fauzi dkk. (2024) *Tantangan dan Solusi Sistem Pengelolaan dan Pengangkutan Sampah Perkotaan*

Aminah & Ridwan (2022) *Pengaruh Jarak Tempuh Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah*

Salim & Lestari (2023) *Aksesibilitas dan Perilaku Membuang Sampah: Studi Kasus di Kawasan Padat Penduduk*

Wahyudi & Sari (2024) *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi*

Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah